

**PERAN PEJABAT SEMENTARA NOTARIS DALAM MELAKUKAN  
PENGURUSAN PROTOKOL NOTARIS PADA PERISTIWA NOTARIS  
YANG MENINGGAL DUNIA SAAT MENGGUNAKAN HAK CUTI  
(STUDI KASUS DI KABUPATEN KULON PROGO)**

Sherlita Anggun W, Djoko Sukisno

**INTISARI**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan. Pertama, yakni untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab Pejabat Sementara Notaris dalam melakukan pengurusan Protokol Notaris apabila melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan (studi kasus di Kabupaten Kulon Progo). Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap klien yang membutuhkan salinan akta apabila Protokol Notaris milik Notaris yang meninggal dunia saat menjalankan cuti belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis data pada penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Cara pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber sedangkan perolehan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Data-data yang diperoleh akan dikumpulkan, diklasifikasikan dan diolah untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dilakukan, penulis memperoleh 2 (dua) hasil kesimpulan. Pertama, Ibu KK selaku Pejabat Sementara Notaris tidak dapat menjalankan ketentuan Pasal 35 ayat (4) UUDN-P sebagaimana mestinya karena terkendala jumlah Protokol Notaris almarhumah FNW yang cukup banyak yakni berjumlah 8 (delapan) lemari besi. Tidak ada aturan yang mengatur ketentuan sanksi jika melanggar Pasal 35 ayat (4) UUDN-P dan berdasarkan hasil penelitian, Ibu KK tidak dikenakan sanksi oleh MPW D.I Yogyakarta. Adapun dalam menjalankan tugas jabatannya Ibu KK mendasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUDN-P. Kesimpulan kedua, berdasarkan kajian yang dilakukan hingga saat ini tidak ada aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap klien dalam membutuhkan salinan akta apabila Protokol Notaris belum diserahkan kepada Notaris penerima protokol. MPD Kabupaten Kulon Progo telah berupaya sebatas pada pembahasan internal saja. Hingga saat ini belum ada satupun klien almarhumah Ibu FNW yang meminta salinan akta. Menyikapi hal tersebut menurut peneliti tidak menutup kemungkinan jika di masa yang akan datang terdapat klien almarhumah Ibu FNW yang meminta salinan akta, sehingga peneliti memberikan 3 (tiga) pilihan upaya konkret yang dapat dilakukan oleh MPD Kulon Progo berupa penyewaan gedung, membeli lemari besi, dan menyimpan Protokol Notaris secara parsial. Opsi membeli lemari besi dan menyimpan Protokol Notaris secara parsial merupakan pilihan yang relevan untuk dapat direalisasikan.

**Kata kunci: Pejabat Sementara Notaris, Protokol Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Salinan Akta.**

**THE ROLE OF INTERIM NOTARY IN MANAGING NOTARY  
PROTOCOL IN THE EVENT OF A NOTARY WHO PASSED AWAY  
WHILE EXERCISING HIS LEAVE RIGHTS  
(CASE STUDY IN KULON PROGO REGENCY)**

Sherlita Anggun W, Djoko Sukisno

**ABSTRACT**

This research has 2 (two) objectives. First, to discover and analyze the responsibilities of the Interim Notary in managing the Notary Protocol if it exceeds the predetermined grace period (case study in Kulon Progo Regency). The second objective is to discover and analyze the form of legal protection for clients who request a copy of the deed if the Notary Protocol belonging to the Notary who passed away while exercising his leave has not been submitted to the Notary receiving the protocol.

This research is compiled by utilizing empirical juridical legal research method. The types of data in this research are obtained from primary data and secondary data. The primary data collection method in this study is acquired through interviews with several respondents and sources. Secondary data is collected by conducting a literature study. The data obtained will be collected, qualified, and processed for further analysis using qualitative analysis.

Based on the results of the research and analysis that has been conducted, the author obtained 2 (two) conclusions. First, Mrs. KK as an Interim Notary was unable to carry out the provisions of Article 35 paragraph (4) of the UUJN-P because there are quite a number of Notary Protocols for the late Notary FNW, which comprises of 8 (eight) safes. There are no provisions governing the sanctions in the case of violation of Article 35 paragraph (4) of the UUJN-P and based on the results of the research, Mrs. KK is not subject to sanctions by MPW D.I. Yogyakarta. The second conclusion based on the studies conducted to date, there are no legal rules governing the protection of clients in requiring a copy of the deed if the Notary Protocol has not been submitted to the Notary receiving the protocol. The MPD of Kulon Progo Regency has tried to be limited to internal discussions only. Until now, none of the clients of the late Mrs. FNW have asked for a copy of the deed. Responding to this, according to the researcher, it is possible that in the future there will be a client of the deceased Mrs. FNW who asks for a copy of the deed, so the researcher gives 3 (three) concrete options for the MPD Kulon Progo in the form of renting a building, buying a safe, and partially save the Notary Protocol. The option of buying a vault and partially storing the Notary Protocol is a relevant option to be realized.

**Keywords: Interim Notary, Notary Protocol, Notary Responsibilities, Copy of the Deed.**